

Analisis Persepsi Masyarakat Nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terhadap Rencana Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Analysis of the Perception of the Palabuhanratu Fishermen's Community, Sukabumi Regency, Regarding the Planned Implementation of the Measured Fishing Policy

Aulia Putri Kapsari Hafel*, Asep Agus Handaka Suryana, Atikah Nurhayati, Ine Maulina

Submission : 26 September 2024, Review: 20 November 2024, Accepted: 6 Januari 2025

*) Email korespondensi: aulia20020@mail.unpad.ac.id

Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363

ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor. Penerapan kebijakan baru umumnya akan mendapatkan tanggapan dan respon yang beragam dari masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat nelayan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat terhadap rencana pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dimulai pada Januari hingga September 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan sampel secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan skoring dengan skala *likert* untuk menganalisis persepsi serta analisis validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nelayan di PPN Palabuhanratu memiliki pemahaman yang rendah terhadap kebijakan PIT. Rendahnya pengetahuan nelayan berdampak pada sikap dan persepsi yang cenderung tidak mendukung implementasi kebijakan PIT. Mayoritas nelayan merasa bahwa kebijakan PIT, termasuk zonasi dan kuota tangkapan, berpotensi merugikan terutama dalam hal akses terhadap sumber daya ikan dan pendapatan.

Kata kunci: persepsi; penangkapan ikan terukur; ppn palabuhanratu; nelayan.

ABSTRACT

The government has issued Government Regulation (PP) Number 11 of 2023 concerning Measured Fishing (PIT), which was created to maintain the sustainability of resources and optimize the sector's economic benefits. The implementation of new policies generally receives varying responses from the public. This study aims to analyze the perceptions of the Palabuhanratu fishing community, Sukabumi Regency, West Java, regarding the planned implementation of the Measured Fishing policy. The study was conducted at the Palabuhanratu Archipelago Fisheries Port (PPN), Sukabumi Regency, West Java, from January to September 2024. Data collection was carried out using a descriptive and quantitative approach with three methods: observation, interviews, and documentation. The sample was determined by purposive sampling. Data analysis used a Likert scale scoring to analyze perceptions, validity, and reliability. The results showed that most fishermen in the Palabuhanratu PPN had a low understanding of the PIT policy. This low level of knowledge of fishermen impacts attitudes and perceptions that tend not to support the

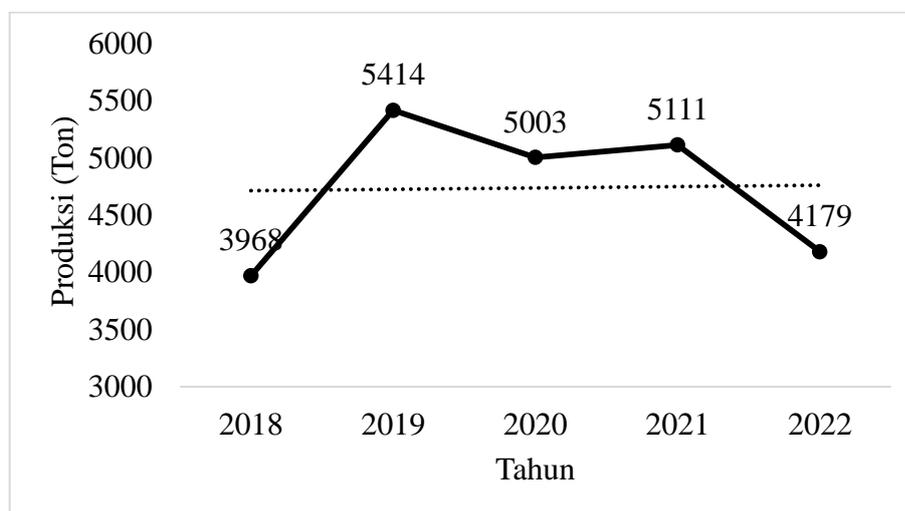
implementation of the PIT policy. The majority of fishermen feel that PIT policies, including zoning and catch quotas, have the potential to be detrimental, especially in terms of access to fish resources and income.

Keywords: *perception ; measurable fishing ; palabuhanratu fishing port ; fishermen.*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar dan kontribusi 40-45% terhadap total produksi perikanan tangkap pantai selatan Jawa Barat (Rizal dkk., 2021). Rata-rata volume produksi ikan yang didaratkan di Kabupaten Sukabumi adalah 9.019.585,01 kg/tahun dengan nilai produksi ikan yang dihasilkan rata-rata Rp 147.269.359.350, -/tahun. Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 mencapai 11.364,98 ton. Kegiatan perikanan tangkap Kabupaten Sukabumi berpusat di Palabuhanratu yang terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Pelabuhan ini memiliki fasilitas lengkap dan dapat menampung kapal-kapal yang beroperasi di sekitar Palabuhanratu dan perairan teritorial Indonesia lainnya.

PPN Palabuhanratu merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat dan memiliki lokasi yang sangat strategis, karena terletak di daerah wisata bahari yang memiliki aktivitas cukup tinggi. Produksi ikan yang dihasilkan di PPN Palabuhanratu ditujukan untuk mensuplai kebutuhan lokal dan juga kota-kota besar di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jakarta, ditunjukkan pada Gambar 1 (Statistik PPN Palabuhanratu, 2022).



Gambar 1. Produksi Perikanan Tangkap Palabuhanratu 2018 – 2022

Berdasarkan Gambar 1, perkembangan produksi perikanan tangkap di Palabuhanratu tahun 2018, produksi berada pada angka 3.968 ton. Kemudian pada tahun berikutnya menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu pada angka 5.414-ton dan selanjutnya mengalami penurunan. Volume produksi ikan di Palabuhanratu yang berubah-ubah secara signifikan dapat memiliki dampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan jika tidak

dikelola dengan baik. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah *overfishing*. Penyebab utama dari *overfishing* adalah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas reproduksi ikan dan pertumbuhan populasi. Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan di perairan Palabuhanratu.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Peraturan ini dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor. Penangkapan ikan terukur didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan dengan berdasarkan zona tertentu dan kuota hasil penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Makna terukur didefinisikan sebagai terkendali, antonim dari lepas kendali atau tidak terkendali. PIT berbasis kuota didefinisikan sebagai pengelolaan perikanan tangkap yang terkendali, berbasis *output control* dimana jumlah ikan yang ditangkap tidak boleh melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Setiap kapal diberikan porsi kuota tangkapan, selanjutnya realisasi jumlah hasil tangkapannya harus dilaporkan agar memastikan setiap kapal menangkap ikan tidak melebihi kuota yang diberikan. Pengelolaan perikanan kurang terkendali terhadap jumlah armada maupun pembatasan jumlah tangkapan maka akan berpeluang terjadinya *overfishing* (Hilborn *et al.*,2020). Maka dari itu wilayah perikanan harus dikelola dengan pendekatan ilmiah.

Salah satu pelabuhan yang menjadi lokasi implementasi kebijakan PIT adalah PPN Palabuhanratu. Penerapan kebijakan baru umumnya akan mendapatkan tanggapan dan respon yang beragam dari masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi dan mendapatkan gambaran terkait persepsi nelayan tentang rencana pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur di PPN Palabuhanratu. Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi penting bagi implementasi kebijakan perikanan terukur yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan nelayan dan sumber daya ikan tidak hanya di PPN Palabuhanratu namun juga di Indonesia.

I. METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat

Lokasi penelitian dilakukan di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan selama 9 bulan mulai Januari - September 2024 yang dimulai dari tahap persiapan, penyusunan proposal penelitian, pengambilan data, penulisan dan pengolahan data hingga pelaporan penelitian.

2. Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini meliputi 3 cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penentuan sampel yang dilakukan penulis yakni dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria responden yang digunakan pada penelitian ini adalah nelayan atau nakhoda kapal pascaproduksi

(kapal dengan izin pusat) dengan ukuran kapal > 5 GT, berfishing base di PPN Palabuhanratu dan bersedia untuk diwawancara. Untuk menganalisis hasil persepsi digunakan *skoring* dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sholahuddin (2015), metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing *value* parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya.

Tabel 1. Kategori Penilaian Skala Likert

Kategori	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum PPN Palabuhanratu

Produksi ikan di PPN Palabuhanratu dalam kurun waktu 2019 - 2023 mengalami fluktuasi. Produksi hasil tangkapan adalah banyaknya hasil tangkapan yang didaratkan di tempat pendaratan ikan dalam hal ini PPN Palabuhanratu, sedangkan nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan atau budidaya di daratkan (Budiman dan Fitria, 2020).

Pada Tabel 2 disajikan produksi dan nilai produksi hasil tangkapan ikan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2019 – 2023 (Statistika PPN Palabuhanratu, 2023).

Tabel 2. Produksi dan Nilai Produksi Ikan di PPN Palabuhanratu 2019 - 2023

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
2019	5.414	111.363.857.750
2020	5.004	110.449.972.184
2021	5.111	97.771.690.500
2022	4.179	75.733.440.500
2023	7.132	143.010.092.500

Jenis hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu sangat beragam, antara lain ikan cakalang, madidihang, cumi-cumi, tongkol pisang cerutu, semar, layur, tuna big eye, layang deles, tuna albakor, tongkol abu-abu, dan sebagainya. Hasil produksi PPN pelabuhan Ratu tidak hanya berasal dari pelabuhan Ratu tapi juga dari domisili lain seperti dari Cilacap, Jakarta, dan Binuangen. Jenis alat tangkap yang digunakanpun beragam antara lain jaring klitik, pancing tonda, pancing ulur, purse seine, trammel net, bagan, dan payang.

2. Konsep Persepsi

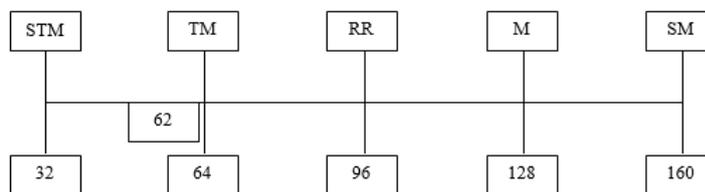
Persepsi adalah pengalaman tentang fenomena, kejadian atau hubungan-hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan dan mengartikannya (Notoatmodjo, 2014). Persepsi adalah konsep yang penting dalam psikologi karena dengan persepsi manusia menghasilkan pandangan dalam hidupnya (Alizamar dan Nasbahry, 2016). Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang

memandang atau mengartikan sesuatu. Munculnya persepsi terbentuk dengan diawali oleh proses pengindraan terhadap suatu stimulus yang kemudian menjadi sebuah perhatian. Setelah dapat melewati proses perhatian dan atensi, maka akan diinterpretasikan oleh individu tersebut melalui pengalamannya yang kemudian akan terbentuk persepsi (Rahmat, 2015).

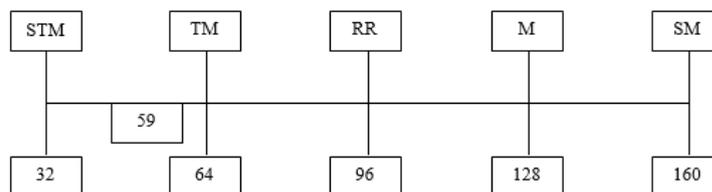
Adanya objek dan rangsangan yang mengenai alat indera atau reseptor dapat menjadi awal mula terbentuknya suatu persepsi, sehingga individu dapat menyadari sesuatu yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Joanes, dkk. (2014) menyatakan proses pembentukan persepsi dimulai dengan masuknya objek melalui suara manusia, penglihatan, rasa, aroma, atau sentuhan, yang diterima oleh indera manusia (reseptor sensorik). Sejumlah besar sensasi yang diperoleh kemudian dipilih dan diterima. Fungsi penyaringan ini dilakukan oleh faktor-faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap.

3. Persepsi Nelayan terhadap Penerapan Penangkapan Ikan Terukur

Persepsi yang positif dari masyarakat nelayan merupakan faktor penting untuk memastikan kebijakan PIT dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu penilaian terhadap persepsi sangat penting dilakukan. Dengan mengetahui persepsi dan sikap masyarakat nelayan terhadap kebijakan PIT, maka akan lebih mudah untuk pembuat kebijakan dapat menyesuaikan, memperbaiki, atau mengoptimalkan kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan. Hasil persepsi nelayan terhadap kebijakan PIT disajikan pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Garis Kontinum Pengetahuan Nelayan terkait Kebijakan PIT

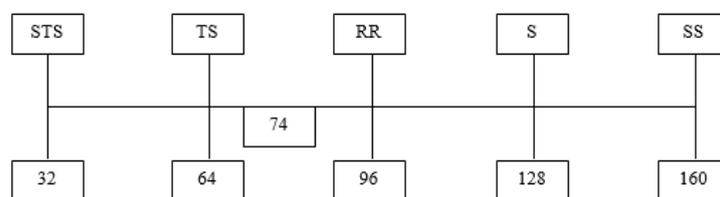


Gambar 3. Garis Kontinum Pengetahuan Nelayan terkait Rencana Penerapan PIT

STM : Sangat Tidak Mengetahui, TM : Tidak Mengetahui, RR : Ragu – Ragu, M : Mengetahui, SM : Sangat Mengetahui

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan skor pada pertanyaan 1 tentang pengetahuan nelayan terkait kebijakan PIT sebesar 62 dengan persentase sebesar 38,75%. Skor tersebut cenderung masuk ke dalam kategori tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap kebijakan

tersebut. Rendahnya skor ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai kebijakan PIT belum tersebar luas dan diterima dengan baik oleh nelayan di PPN Palabuhanratu. Pada pertanyaan mengenai pengetahuan nelayan tentang rencana penerapan kebijakan PIT di PPN Palabuhanratu juga diperoleh skor yang rendah yaitu sebesar 59 dengan persentase 36,87% dengan kategori tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nelayan belum menyadari atau mengetahui informasi mengenai rencana penerapan kebijakan PIT di PPN Palabuhanratu. Penelitian relevan dilakukan oleh Saeful (2023) dengan tujuan untuk melihat persepsi masyarakat perikanan skala kecil terhadap penangkapan ikan terukur di Kepulauan Aru. Penelitian dilakukan pada bulan Maret – Juli 2022 di Desa Samang dan Desa Benjina, Kepulauan Aru. Pengetahuan masyarakat terhadap penangkapan ikan terukur, Desa Samang dan Desa Benjina sebagian besar tidak mengetahui tentang penangkapan ikan terukur disebabkan oleh kurangnya akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat.



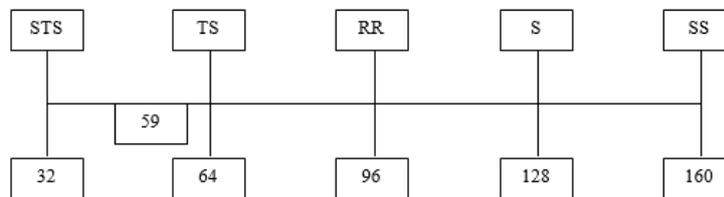
Gambar 4. Garis Kontinum Sosialisasi dan Pendampingan PPN Palabuhanratu

STS : Sangat Tidak Sering, TS : Tidak Sering, RR : Ragu – Ragu, S : Sering, SS : Sangat Sering

Sosialisasi dan pendampingan oleh pihak PPN terkait kebijakan PIT, diperoleh skor 74 dengan persentase sebesar 46,25%. Skor tersebut berada di antara rentang tidak sering dan ragu-ragu namun cenderung masuk ke dalam kategori tidak sering. Nelayan merasa sosialisasi yang dilakukan masih kurang. Beberapa nelayan mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan memang ada, namun biasanya ditunjukkan kepada pengurus atau pemilik kapal, bukan langsung kepada mereka. Hal ini mencerminkan bahwa nelayan di PPN Palabuhanratu belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan PIT, yang berdampak pada pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut. Keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai dapat menyebabkan nelayan kurang memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari kebijakan PIT.

Akibat rendahnya pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan persepsi mereka terhadap kebijakan PIT. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan PIT tersampaikan dengan jelas dan komprehensif kepada nelayan. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari nelayan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PIT. Dengan demikian, nelayan akan lebih siap dan memahami implikasi dari kebijakan tersebut terhadap kegiatan penangkapan ikan mereka di masa mendatang. Penelitian Poltak, dkk. (2024), menjelaskan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur dari pemerintah kepada nelayan masih belum optimal dan kurang merata. Masih

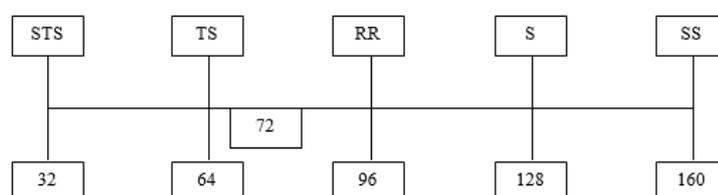
banyak nelayan yang belum mendapatkan sosialisasi dengan baik mengenai kebijakan tersebut. Hasil wawancara di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sorong bahwa sosialisasi pernah dilakukan melalui *zoom* terbatas kepada pelaku usaha yang memiliki kapal diatas 30 GT. Tim dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon juga sudah melakukan sosialisasi kepada pengusaha perikanan, namun belum menysasar kepada nelayan kecil.



Gambar 5. Garis Kontinum Kesetujuan Terhadap Penerapan PIT

STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S: Setuju, SS: Sangat Setuju

Kesetujuan nelayan terhadap implementasi kebijakan PIT di PPN Palabuhanratu, diperoleh skor 59 dengan persentase sebesar 36,87% yaitu cenderung tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Sejalan dengan Zaettika (2024) yang menganalisis tingkat persepsi nelayan jaring tarik berkantong 30 GT di PPP Tegalsari Kota Tegal terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata skor secara keseluruhan yang diperoleh sebesar 46,18 yang menunjukkan posisi sikap nelayan atau persepsi nelayan bahwa nelayan tidak setuju dengan adanya kebijakan PIT. Hasil ini mengindikasikan adanya penolakan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya informasi yang memadai terkait kebijakan PIT, yang membuat nelayan merasa tidak mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan, manfaat, dan dampaknya terhadap aktivitas penangkapan mereka. Ketidakjelasan informasi sering kali menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak atau bahkan merugikan nelayan. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap kebijakan bisa juga dipicu oleh pengalaman yang telah membentuk persepsi negatif nelayan terhadap intervensi kebijakan pemerintah di sektor perikanan.



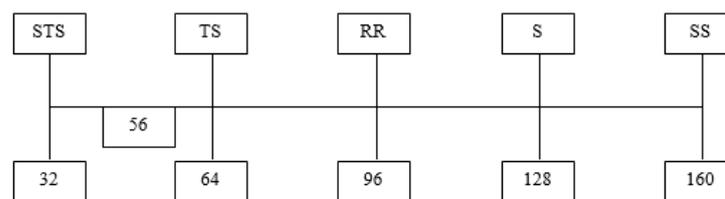
Gambar 6. Garis Kontinum Kesetujuan Terhadap Zonasi

STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S : Setuju, SS: Sangat Setuju

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan langsung dengan nelayan, guna menjelaskan secara transparan tentang kebijakan PIT serta memberikan jaminan bahwa kepentingan nelayan tetap diperhatikan. Upaya ini diharapkan

dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan PIT di wilayah PPN Palabuhanratu.

Selanjutnya pada pertanyaan mengenai pembagian zonasi, diperoleh skor 72 dengan persentase sebesar 45%. Skor tersebut berada diantara rentang tidak setuju dan ragu-ragu namun cenderung masuk ke dalam kategori tidak setuju. Nelayan mengaku ragu dan khawatir akan adanya pembatasan area penangkapan, yang dapat mempengaruhi akses ke sumber daya ikan yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian mereka. Pembatasan area penangkapan melalui zonasi sering kali dianggap sebagai upaya yang dapat mengurangi fleksibilitas nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan yang produktif, terutama jika zonasi tersebut membatasi akses ke wilayah-wilayah yang dikenal melimpah sumber daya ikannya. Menurut Cahyarani (2024), keraguan nelayan didasari oleh proses adaptasi yang harus dilakukan dengan adanya zonasi wilayah penangkapan. Pemilik kapal harus melakukan penyesuaian terhadap biaya operasional kapal serta strategi penangkapan yang harus dilakukan. Selain itu, nelayan sedikit khawatir dan masih belum terbiasa dengan zonasi penangkapan ikan yang akan membatasi akses penangkapan ikan yang dilakukan sebelumnya tanpa pembatasan dan WPP yang ditentukan.



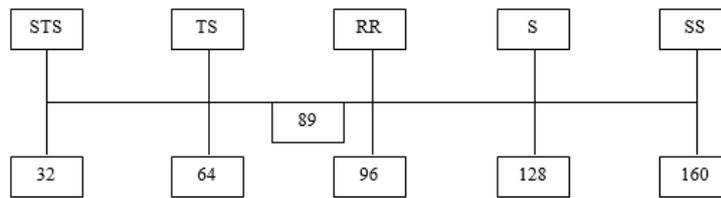
Gambar 7. Garis Kontinum Kesetujuan Terhadap Kuota

STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S : Setuju, SS: Sangat Setuju

Terkait kesetujuan terhadap kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota diperoleh skor 56 dengan persentase sebesar 35% menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tidak setuju dengan adanya kuota. Hal tersebut didasari oleh kekhawatiran dan keraguan nelayan akan pembatasan hasil tangkapan yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Menurut Cahyarani (2024), keraguan juga disebabkan oleh adanya ketidaksiapan nelayan untuk beradaptasi terhadap kebijakan baru tersebut termasuk gambaran berkaitan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan berbasis kuota dipersepsikan sebagai ancaman yang dapat mengurangi kemampuan nelayan untuk menangkap ikan secara bebas sesuai dengan potensi hasil tangkapan yang tersedia di laut.

Pembatasan dianggap tidak adil, terutama jika nelayan merasa bahwa mereka memiliki potensi untuk menangkap lebih banyak ikan namun terhalang oleh batasan kuota yang diberlakukan. Kebijakan penangkapan ikan terukur yang memfokuskan pada zona dan kuota, berdampak pada *overlapping* daerah penangkapan dan durasi trip nelayan sehingga kebijakan ini dinilai sangat tidak tepat dan merugikan nelayan, sehingga harus dievaluasi kembali (Zaettika, 2024). Oleh karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan tersebut serta pelibatan nelayan dalam pembuatan kebijakan sehingga nelayan merasa bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan mereka secara

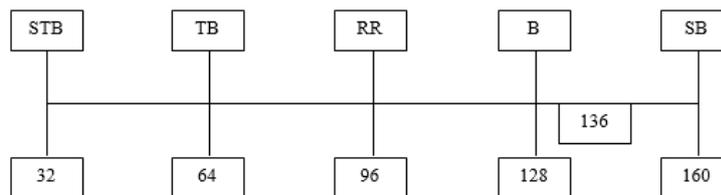
ekonomi dapat membantu meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota.



Gambar 8. Garis Kontinum Kesetujuan Terhadap PNBP Pascaproduksi

STS: Sangat Tidak Setuju, TS : Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S : Setuju, SS : Sangat Setuju

Selanjutnya pada pertanyaan tentang penerapan PNBP pascaproduksi, didapatkan skor 89 dengan persentase sebesar 55,62%, yang menunjukkan sikap netral. Sebagian besar nelayan mengaku tidak terlalu memahami tentang PNBP pascaproduksi karena semua proses dan pembayaran terkait PNBP biasanya diurus oleh pengurus atau pemilik kapal.

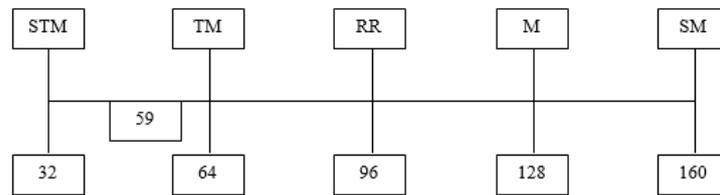


Gambar 9. Garis Kontinum Pengaruh PIT Terhadap Hasil Tangkapan

STB: Sangat Tidak Berpengaruh, TB : Tidak Berpengaruh, RR : Ragu – Ragu, B : Berpengaruh, SB: Sangat Berpengaruh

Skor 136 dengan persentase 85% pada pertanyaan mengenai dampak kebijakan PIT terhadap hasil tangkapan menunjukkan bahwa mayoritas nelayan percaya kebijakan akan berpengaruh terhadap jumlah ikan yang dapat mereka tangkap. Tingginya skor ini mencerminkan adanya kekhawatiran yang mendalam di kalangan nelayan bahwa kebijakan PIT mungkin akan membatasi atau mengurangi hasil tangkapan mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kekhawatiran ini mungkin timbul dari persepsi bahwa kebijakan PIT akan memperketat regulasi atau mengurangi akses nelayan ke sumber daya ikan, baik melalui pembatasan kuota, zonasi, atau aturan lainnya yang diatur dalam kebijakan tersebut. Bagi nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan untuk keberlangsungan hidup, setiap perubahan dalam aturan penangkapan ikan dapat dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, persepsi bahwa kebijakan ini akan memiliki dampak signifikan mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dari pihak pemerintah. Sosialisasi yang lebih mendalam serta penjelasan mengenai bagaimana kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tanpa mengorbankan kesejahteraan nelayan sangat diperlukan. Dengan demikian, nelayan dapat

lebih memahami tujuan jangka panjang dari kebijakan ini dan mengurangi ketakutan atau resistensi terhadap perubahan yang akan datang.



Gambar 10. Garis Kontinum Keuntungan PIT Terhadap Nelayan

STM: Sangat Tidak Menguntungkan, TM: Tidak Menguntungkan, RR : Ragu - Ragu
 M: Menguntungkan, SM: Sangat Menguntungkan

Berdasarkan hasil analisis data, skor 59 dengan persentase 36,87% menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan memiliki ketidaksetujuan terhadap klaim bahwa kebijakan PIT akan memberikan keuntungan bagi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak dari mereka merasa bahwa kebijakan ini mungkin tidak akan memberikan manfaat yang signifikan atau malah dapat merugikan kegiatan penangkapan ikan mereka. Sejalan dengan penelitian Saeful (2023), bahwa persepsi nelayan terhadap penangkapan ikan terukur sebanyak 70% tidak setuju yang menandakan bahwa selain kurangnya pemahaman masyarakat perikanan skala kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru terkait rencana kebijakan penangkapan ikan terukur, kebijakan tersebut kurang memiliki manfaat ketika kebijakan telah dijalankan.

Persepsi negatif ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang kebijakan PIT, ketidakpastian tentang implementasinya, atau kekhawatiran mengenai dampak langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Namun, meskipun sebagian besar nelayan tidak setuju dengan kebijakan PIT, mereka merasa bahwa kebijakan ini adalah aturan pemerintah yang harus mereka patuhi. Mereka menyadari bahwa, meskipun ada ketidaksetujuan, mereka tetap harus mengikuti kebijakan tersebut karena mereka hanya menjalankan tugas untuk mencari nafkah.

III. KESIMPULAN

Sebagian besar nelayan di PPN Palabuhanratu memiliki pemahaman yang rendah terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Rendahnya pengetahuan nelayan berdampak pada sikap dan persepsi yang cenderung tidak mendukung implementasi kebijakan PIT. Mayoritas nelayan merasa bahwa kebijakan PIT, termasuk zonasi dan kuota tangkapan, berpotensi merugikan terutama dalam hal akses terhadap sumber daya ikan dan pendapatan. Kekhawatiran juga dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga nelayan tidak sepenuhnya memahami manfaat kebijakan PIT. Selain itu, nelayan juga merasa bahwa kebijakan PIT tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan inklusif untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan nelayan terhadap kebijakan PIT, serta menjamin bahwa kepentingan mereka tetap diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan ini.

Perlu adanya peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan PIT tersampaikan dengan jelas dan komprehensif kepada nelayan. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari nelayan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PIT. Dengan demikian, nelayan akan lebih siap dan memahami implikasi dari kebijakan tersebut terhadap kegiatan penangkapan ikan mereka di masa mendatang.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu dan seluruh responden yang telah bersedia diwawancarai pada penelitian ini serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

V. REFERENSI

- Alizamar & Nasbahry, C. (2016). *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*. Yogyakarta : Media Akademi.
- Budiman, D., & Fitria, N. (2020). Analisis Spill Oil Terhadap Volume Dan Nilai Produksi Perikanan Di Laut Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. *Jurnal Jalasena*, 1(2), 99-107.
- Cahyarani, A. (2024). *Kebijakan Perikanan Terukur di PPS Nizam Zachman Jakarta : Persepsi Nelayan Pemilik Kapal Bouke Ami dan Jala Jatuh Berkapal Terhadap Implementasi Kebijakan Perikanan Terukur di PPS Nizam Zachman Jakarta*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hilborn, R., Amoroso, R. O., Anderson, C. M., *et al.* (2020). Effective Fisheries Management Instrumental in Improving Fish Stock Status. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(4), 2218–2224.
- Joanes, J., Ahmad, S. A., Goh, X. Z., & Kadir, S. (2014). *Persepsi & Logik*. Universitas Teknologi Malaysia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pemerintah Pusat. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*.
- Poltak, H., Handayani, Muhfizar, dkk. (2024). Persepsi Nelayan terhadap Penangkapan Ikan Terukur Ditinjau Dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9 (3), 249-263.

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. (2022). *Statistik PPN Palabuhanratu 2022*. Sukabumi Jawa Barat.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. (2023). *Statistik PPN Palabuhanratu 2023*. Sukabumi Jawa Barat.
- Rahmat, J. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Rizal, A., Apriliani, I. M., & Permana, R. (2021). Social Morphology of Poverty in Tourism Area: A Thick Description Study in Parakansalak Village of Sukabumi, West Java, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 34(1), 132–139.
- Saeful. (2023). Persepsi Masyarakat Perikanan Skala Kecil (*Small-Scale Fisheries*) Terhadap Penangkapan Ikan Terukur Di Kepulauan Aru (WPP 718). In *Riset Kolaboratif Persepsi Masyarakat Mengenai Penangkapan Ikan Terukur Di WPP 714, 715 dan 718 Serta Riset Perikanan Skala Kecil Pada Perairan Pulau Ternate* (hal. 23–32).
- Sholahuddin, M. (2015). *SIG untuk Memetakan Daerah Banjir dengan Metode Skoring dan Pembobotan (Studi Kasus Kabupaten Jepara)*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumiati. (2008). *Kajian Fasilitas dan Produksi Hasil Tangkapan Dalam Menunjang Industri Pengolahan Ikan di PPN Palabuhanratu Sukabumi, Jawa Barat*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Zaettika, G. (2024). *Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur*. Universitas Pancasakti Tegal.